

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andrew D. Murray, *Information Technology Law: The Law and Society*, 5th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2023).

Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004).

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*.

Bronsword, *Law 3.0*.

Darmawan Napitupulu, dkk. *E-Government: Implementasi, Strategi dan Inovasi*. (Medan, 2020). Yayasan Kita Menulis.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, “*Pengertian, Keuntungan & Kerugian E-Government*”, tersedia pada Diskominfo Kabupaten Badung, <https://diskominfo.badungkab.go.id/artikel/17777-pengertian-keuntungan-kerugian-e-government>, diakses pada 24 April 2026.

Edmon Makarim, *Hukum Pembuktian Elektronik* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020).

Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).

Edmon Makarim, *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023).

Jarot Dian Susatyo, *Kecerdasan Buatan : Kajian Konsep dan Penerapan*, (Semarang : Yayasan Prima Agus Teknik, 2021).

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: Kompas, 2008).

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2006).

Muh. Afif Mahmud. *Buku Ajar Hukum dan Digitalisasi*. Yoga Pratama

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021).

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

Stuart Russell dan Peter Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th ed. (Harlow: Pearson, 2021).

Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006)

Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah* (Jakarta: Kencana, 2021).

Jurnal

Benjamin Alarie, Anthony Niblett, and Albert H. Yoon, "How Artificial Intelligence Will Affect The Practice Of Law," *University Of Toronto Law Journal* 68, No. May 2023 (2018): 106-24, <https://doi.org/10.3138/utlj.2017-005>

Derry Yusuf Hendriana, "Mencari Arah Pertanggungjawaban Hukum Artificial Intelligence di Indonesia," *Mahkamah Agung Republik Indonesia (MariNews)*, 13 Februari 2026.

Devita Candra, "Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Perlindungan Pihak Ketiga," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 3, Mei 2025, Hlm. 262–274, DOI: <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i3.931>

Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum," *Refleksi Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014.

Khoeri, I., & Iskandar Mulyana, D. (2021). Implementasi Machine Learning dengan Decision Tree Algoritma C4.5 dalam Penerimaan Karyawan Baru pada PT. Gitareksa Dinamika Jakarta. *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, 1(7). <https://doi.org/https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i7.12>

Mirtha Ilmi, Eva Hany Fanida, Meirinawati, dan Tenda Aktiva Oktariyanda, "Transformasi Digital Layanan Sertipikat Tanah Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung," *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum*, Vol. 3, No. 1, Januari 2026.

Khodijah, S., & Rizki, C. A. (2025). Manajemen perubahan sebagai faktor kunci keberlanjutan organisasi. *Journal of Management, Economics, and Accounting Research*, 1(1).

Moh. Hasanuddin, dkk., "Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Perspektif Hukum Indonesia: Analisis Normatif Atas Tantangan, Implikasi, dan Model Regulasi Ideal," *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 6, 2026.

Muhammad Hifdzi Alimuddin, dkk., "Transformasi Digital Sertipikat Tanah dan Respons Masyarakat Terhadap Penerapannya," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8, No. 3, 2025.

Nasab Sabrina Febriyanti dkk., "Transformasi Digital Pendaftaran Tanah sebagai Langkah Strategis Mewujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah," *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 3, No. 1, Februari 2026.

Ryan Calo, "Artificial Intelligence Policy: A Primer and Roadmap," *U.C. Davis Law Review*, Vol. 51, No. 2 (2017).

Sy. Arifin, dkk. Transformasi Digital Administrasi Pertanahan: Implementasi Dan Tantangan Sertipikat Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Hukum*. Vol. 1 (2).
<https://doi.org/10.36355/rlj.v6i1>

Syarifaatul Hidayah, Evi Hariyani, Lilis Mukarromah, Aprila Niravita, dan M. Adymas Hikmal Fikri, "Tantangan dan Peluang Sertipikat Elektronik dalam Reformasi

Pendaftaran Tanah di Era Digital," *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, Vol. 1, No. 6, November 2024.

Skripsi

Bella Salsabila, *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Majalengka Dikaitkan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2020)

Herwanto Cahyowibowo, *Pelaksanaan Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) Menurut Perkaban No. 18 Tahun 2009 di Kabupaten Karanganyar* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas

Web

Amazon, "*What is Artificial Intelligence (AI)?*", What is Artificial Intelligence (AI).

Anindita Rahma Salsabilla, "Peran Artificial Intelligence (AI) dalam Merumuskan Kebijakan di Indonesia," Knowledge Management System (KMS) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), "Sertipikat Tanah Elektronik Resmi Diterapkan, Bagaimana Jaminan Keamanannya?".

Cole Stryker & Eda Kavlakoglu, "What is artificial intelligence (AI)?", IBM, diakses 2026, <https://www.ibm.com/think/topics/artificial-intelligence>

Coursera Staff, “What Is AI Integration?,” Coursera, diperbarui 20 Mei 2025.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, “*Pengertian, Keuntungan & Kerugian E-Government*”, tersedia pada Diskominfo Kabupaten Badung, <https://diskominfo.badungkab.go.id/artikel/17777-pengertian-keuntungan-kerugian-e-government>.

Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Transformasi Digital Pengawasan HGU: Mengakselerasi Pengendalian Pertanahan melalui Inovasi Geo

Dr. Baiq Hana Susanti, M.Sc, “Dasar-Dasar AI: Panduan Pemula“, AICI, 21 Agustus 2025, <https://aici-umg.com/article/dasar-dasar-ai-panduan-pemula/>

Irene Cristna Silalahi, “Transformasi Digital Pertanahan: Modernisasi dan Kepastian Hukum Melalui Sertipikat Tanah Elektronik”, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MariNews).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, “ApaSih Pentingnya Sertipikat Elektronik?”.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, "Gen Y dan Z Punya Peran Strategis dalam Transformasi Digital Layanan Pertanahan," <https://www.atrbpn.go.id/peta/gen-y-dan-z-punya-peran-strategis-dalam-transformasi-digital-layanan-pertanahan>.

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, "Membangun Ekosistem AI di Indonesia untuk 2030, Potensi dan Tantangan,".

Pemerintah Kalurahan Plembutan, "Mengenal Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan),"

Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri, "*Kasus Kejahatan Manipulasi Data secara ITE Meningkat*," 16 Juni 2025, diakses melalui https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_kejahatan_manipulasi_data_secara_ite_meningkat

WITS, What is AI Integration: Types, Pros & Cons, Examples, and More.

Zahrashafa P. Mahardika dan Angga Priancha, "Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini", Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 30 April 2021, <https://law.ui.ac.id/pengaturan-hukum-artifical-intelligence-indonesia-saat-ini-oleh-zahrashafa-pm-angga-priancha/>.

Undang-Undang

PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 71 General Data Protection Regulation

PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Permen Agraria/Kepala BPN No. 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik.

Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

Pasal 1 Ayat (9) Permen ATR/Kepala BPN No. 3 Tahun 2023

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)